

11. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Submission date: 07-Jan-2020 02:18PM (UTC+0700)
by Ertlen Rining Nawangsari

Submission ID: 1239722164

File name: 11._IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_KETERBUKAAN_INFORMASI_PUBLIK.pdf (200.99K)

Word count: 4219

Character count: 28765

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

Wahyu Kurnia Sari, Ertien R. Nawangsari

Pengutipan: Setyarini, A. W. & Nawangsari, E. R. (2019), Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bps) Di Desa Sambigede Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, *Public Administration Journal*, 2(1), 86-95.

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: wahyukurnias@yahoo.com

(Submitted: 16-01-2018, Revised: 18-02-2019, Accepted: 16-03-2019)

ABSTRAK

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberi jaminan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik secara luas, serta memberi kewajiban kepada Badan Publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, tidak terkecuali bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan sebagai upaya mewujudkan *good governance* di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah berhasil mewujudkan *good governance* di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah terpenuhi dengan baik. Hanya saja ada sedikit kekurangan yaitu pada faktor komunikasi, yaitu masih ada beberapa Informasi Publik di web PPID Provinsi Jawa Timur yang belum diperbarui, khususnya informasi yang termasuk kategori Informasi yang Wajib Diumumkan dan Disediakan Secara Berkala.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan Publik, Keterbukaan Informasi Publik, Good Governance*

IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION OPENNESS IN THE COMMUNICATION AND INFORMATION SERVICES OF EAST JAVA AS A EFFORTS TO REACH *GOOD GOVERNANCE*

ABSTRACT

Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness (KIP) guarantees the public to be able to access public information widely, and gives obligations to the Public Agency to carry out public information disclosure, including the East Java Provincial Government. The East Java Provincial Government implemented the Public Information Disclosure Policy through the Communication and Information Agency of East Java Province. The implementation of the Public Information Disclosure Policy was carried out as an effort to realize *good governance* in the East Java Provincial Government.

This study used descriptive qualitative method. The technique of collecting data is done through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Public Information Disclosure Policy in the Communication and Information Agency of East Java Province has succeeded in realizing good governance in the East Java Provincial Government. In addition, the factors that influence the success of policy implementation are the factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure that are well fulfilled. But that there are a few shortcomings, namely the communication factor, namely there are still some Public Information on the East Java PPID Province website that have not been updated, especially information that is included in the Periodic Information that Must Be Announced and Provided.

Keywords: *Implementation of Public Policy, Public Information Disclosure, Good Governance*

I. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai suatu upaya perubahan secara menyeluruh baik pada struktur maupun perilaku dalam organisasi pemerintahan. Reformasi birokrasi memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Samodiningrat sebagaimana dikutip oleh Samaryadi (2016: 13), yang mengatakan bahwa "*good governance* sebagai upaya pemerintah yang antah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme". Pelaksanaan *good governance* harus berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, salah satunya adalah prinsip transparansi atau keterbukaan.

Prinsip transparansi yaitu prinsip yang mengharuskan adanya perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas rahasia negara. Menurut Santosa (2008:131), "prinsip keterbukaan atau transparansi merupakan adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang)". Hal ini berarti bahwa ada batasan antara informasi yang terbuka atau boleh diketahui masyarakat/publik dengan informasi yang merupakan rahasia negara.

Di Indonesia, pelaksanaan keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik memberi jaminan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi secara luas tentang penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memberi kewajiban kepada Badan Publik untuk melakukan keterbukaan informasi publik seperti yang termuat dalam Pasal 7 ayat (3) UU KIP, yaitu bahwa "Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan". Pelaksanaan keterbukaan informasi publik wajib pula dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki tugas "Membantu Gubernur menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi & bidang komunikasi dan informasi serta tugas pemerintahan". Oleh sebab itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menjalankan tugas di bidang komunikasi dan informasi, baik pada tahap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik sering mendapat penghargaan dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Award. Misalnya, pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih peringkat pertama dan pada tahun 2015 meraih juara 2 dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Tingkat Nasional dengan kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi.

2. METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mewujudkan *Good Governance*. Penulis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik menjadi bagian penting dalam proses kebijakan publik, karena implementasi kebijakan merupakan proses melaksanakan suatu kebijakan sehingga kebijakan dapat mencapai tujuan.

Itiatih dan Krisnibowo (2018) berpendapat bahwa salah satu penentu keberhasilan dari kebijakan publik terdapat pada langkah pelaksanaannya di lapangan, atau dengan kata lain implementasi yang baik akan menghasilkan kinerja kebijakan yang baik. Walaupun sebuah kebijakan diformulasikan dengan sempurna, tanpa implementasi yang baik maka kebijakan tersebut belum menjadi kebijakan yang berdampak bagi masyarakat. Sedangkan menurut Wijaya dan Supendo sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2014: 57), "implementasi kebijakan adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik". Selain itu, Nugroho (2003: 158) mengungkapkan bahwa, "implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya". Suatu kebijakan dalam proses implementasinya akan berhasil jika memenuhi faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III sebagaimana dikutip oleh Subesono (2015: 90-92), mengemukakan bahwa "implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi". Oleh sebab itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik harus memperhatikan keempat faktor-faktor tersebut.

Pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, yang bertujuan agar pihak yang menerima informasi dapat memahami dengan baik informasi yang diberikan. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud adalah informasi publik, dimana informasi publik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu "informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik". Dengan demikian, informasi publik harus diketahui oleh masyarakat karena berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau berkaitan dengan kepentingan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Publik telah menyediakan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan yang tertulis di dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik tersebut antara lain informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala sesuai dengan Pasal 9, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sesuai Pasal 10, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai Pasal 11. Ketiga kategori

Informasi Publik tersebut, selanjutnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dirinci menjadi Daftar Informasi Publik yang terkait dengan kewenangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Namun, beberapa informasi publik yang tersedia di web belum diperbarui, khususnya pada informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala.

Dalam proses implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, komunikasi dilakukan mulai dari komunikasi antara pembuat kebijakan dengan implementor kebijakan, hingga komunikasi antara implementor kebijakan dengan target group atau masyarakat. Komunikasi menjadi hal yang penting dalam proses implementasi kebijakan, karena komunikasi dapat memperlancar implementasi kebijakan. Selain itu, komunikasi dapat mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dalam implementasi kebijakan sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Komunikasi antara pembuat kebijakan dengan implementor kebijakan bertujuan agar implementor kebijakan dapat memahami dengan baik tujuan dan sasaran kebijakan yang akan ditransmisikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III sebagaimana dikutip oleh Subersano (2015: 50), yang mengatakan bahwa "keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran".

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, komunikasi antara pembuat kebijakan dengan implementor kebijakan dilakukan melalui rapat tahunan untuk menyampaikan program kerja yang akan dijalankan pada tahun berjalan. Rapat satu tahun sekali ini diikuti oleh seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Selain itu, komunikasi juga dilakukan berdasarkan hierarki jabatan, yaitu dari Kepala Dinas ke Kepala Bidang, Kepala Bidang ke Kepala Seksi, serta Kepala Seksi ke staff-staffnya. Komunikasi tersebut dilakukan melalui rapat rutin setiap minggu, serta jika ada kebijakan atau informasi baru yang harus disampaikan kepada masyarakat, maka pembuat kebijakan langsung mengkomunikasikan kepada implementor kebijakan. Selanjutnya, untuk komunikasi dari tingkat Bidang maupun Seksi, atau bahkan komunikasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui rapat koordinasi dan focus group discussion (FGD).

Sedangkan untuk komunikasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai implementor kebijakan dengan target group atau masyarakat, dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dilakukan melalui web-web yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain jatimprov.go.id, kominfo.jatimprov.go.id, dan jatimprov.go.id/ppid. Dalam web tersebut tersedia informasi publik tentang Provinsi Jawa Timur. Selain itu, di web tersebut terdapat pula menu Suara Pembaca, dimana dalam menu tersebut masyarakat dapat menyampaikan kritik maupun saran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut akan memungkinkan komunikasi dan arah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif pada proses penyelenggaraan pemerintahan, serta pada akhirnya akan mendorong terwujudnya good governance di Provinsi Jawa Timur.

Penyebarluasan informasi publik juga dilakukan melalui media televisi dan radio, melalui sosialisasi atau muka atau dialog interaktif antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan masyarakat, melalui majalah "Potensi", melalui ruang workshop *Information Technology* (IT), serta adanya inovasi Ruang Baca yang dipentakkan bagi masyarakat yang

ingin membaca dan mengetahui Informasi Publik yang tidak boleh untuk disalin. Masyarakat juga bisa mendapat informasi publik dengan mengajukan permohonan informasi melalui prosedur PPID atau PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun PPID Pembantu yang dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penyediaan berbagai media penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat, akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi publik. Kemudahan tersebut mengisyaratkan bahwa keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur telah baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Kamaliyah (2015: 1115), yang menyatakan bahwa "keterbukaan atau transparansi dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan baik oleh pihak dalam maupun pihak luar dari suatu institusi atau lembaga".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada faktor komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya berhasil mengimplementasikan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya mewujudkan *good governance*. Hal ini karena masih ada beberapa Informasi Publik yang belum dipublikasi pada web PPID Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait dengan informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala.

Kedua, sumber daya. Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Tanpa adanya sumber daya, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III sebagaimana dikutip oleh Sabarsono (2015: 91), yang mengatakan bahwa "walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan efektif". Selain itu, personifikasi sumber daya yang ada harus dilakukan sebaik-baiknya, sehingga sumber daya tersebut dapat seralokasi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance* menurut UNDP sebagaimana dikutip oleh Saib (2016: 157), yaitu prinsip *effectiveness and efficiency*, dimana prinsip tersebut menjelaskan bahwa "proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin". Sumber daya yang berperan dalam proses implementasi suatu kebijakan dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya sarana prasarana atau fasilitas.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan harus memadai, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Kuantitas atau jumlah pegawai yang mengimplementasikan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik akan mempengaruhi tanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melibatkan seluruh pegawai dari berbagai bidang yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah sekitar 200 orang (tepatnya 190 orang). Sedangkan pada Seksi Layanan Informasi Publik, jumlah pegawai ada 4 orang, yang terdiri dari Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan 3 staff.

Selanjutnya, untuk Tim PPID Provinsi Jawa Timur sebagai tim pelaksana Keterbukaan Informasi Publik, memiliki anggota yang berjumlah 14 orang. Anggota PPID Provinsi Jawa Timur berasal dari beberapa instansi, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 8 orang, Biro Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 1 orang, Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 2 orang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 1 orang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa

Timur dengan jumlah 1 orang, dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 1 orang. Anggota Tim PPID Provinsi Jawa Timur yang berasal dari beberapa instansi tersebut, dapat mendukung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini karena terdapat penyebaran tanggung jawab untuk penyediaan dan pemertuan Informasi Publik bagi masyarakat.

Selain kuantitas pegawai, kualitas pegawai juga sangat menentukan keberhasilan implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini karena kualitas pegawai yang bagus akan mempengaruhi efektifitas proses implementasi kebijakan. Jika dilihat dari jenjang pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, jenjang pendidikan paling banyak terdapat pada jenjang Pendidikan Tinggi (D III, S1, dan S2). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sudah baik. Proses pegawai memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang baik. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pegawai, antara lain dengan adanya Pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek), adanya pengawasan melekat (waskat) dari atasan, serta adanya *retrospective evaluation*.

Pada sumber daya keuangan, anggaran tahun berjalan telah diencanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dalam implementasinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mampu merealisasikan anggaran tahun 2018 sebesar 94,57% atau Rp70.935.446,342 dari rencana anggaran sebesar Rp75.008.146.000. Selanjutnya pada sumber daya sarana prasarana, hal yang penting dan harus tersedia untuk pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik adalah dengan adanya perangkat komputer yang digunakan untuk melayani permohonan informasi melalui web, meja layanan informasi bagi PPID Provinsi Jawa Timur, papan struktur organisasi, brosur, papan pengumuman, serta adanya Ruang Baca Informasi Publik. Namun, terdapat keterbatasan pada jumlah komputer yang ada di *workdesk* PPID Provinsi Jawa Timur yaitu hanya ada 1 (satu) perangkat komputer.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada faktor sumber daya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah berhasil mengimplementasikan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya mewujudkan *good governance*. Hal ini terbukti dengan telah tersedia sumber daya yang memadai, baik pada sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya sarana prasarana.

Kemotivasi Disposisi merupakan *watak* atau karakteristik yang dimiliki oleh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai implementor kebijakan. Disposisi dari implementor kebijakan menjadi hal yang penting karena selain implementor harus memahami isi kebijakan, implementor juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga sikap implementor harus diperhatikan. Disposisi yang baik dari implementor kebijakan akan mendukung keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan. Hal ini seperti yang diungkapkan Edward III sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2015: 92), yang mengatakan bahwa "apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah".

Dalam hal ini, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan dan program yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Timur dapat terlaksana secara berkesinambungan. Sehingga hal tersebut akan mendukung terwujudnya *good governance* di Provinsi Jawa Timur. Komitmen ini diwujudkan pula melalui sikap tanggung jawab pegawai untuk melaksanakan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, yakni dengan *menaati* dan menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Gubernur Jawa Timur No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, serta Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur juga bersikap baik, jujur, dan ramah ketika melaksanakan proses pelayanan permohonan informasi kepada masyarakat atau Pemohon Informasi. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur juga bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya menu "Suaru Pembaca" di web Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan web Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menu tersebut masyarakat dapat menuliskan pendapat dan aspirasinya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses kebijakan, serta pada akhirnya akan dapat mendorong terwujudnya *good governance* di Provinsi Jawa Timur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada faktor disposisi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah berhasil mengimplementasikan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya mewujudkan *good governance*. Hal ini terbukti dengan adanya sikap pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang baik, karena pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai implementor kebijakan memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan dan program terkait Keterbukaan Informasi Publik sehingga kebijakan dan program dapat berjalan secara berkesinambungan. Selain itu, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki sikap tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang berkaitan dengan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi, serta selalu bersikap baik, jujur, ramah, dan terbuka ketika melaksanakan pelayanan permohonan informasi publik kepada masyarakat.

Kecepatan, struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bergas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, sehingga akan berpengaruh pada kompleksitas Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini seperti yang diungkapkan Edward sebagaimana dikutip oleh Sabarsora (2015: 92), yang mengatakan bahwa "struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks".

Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar operating procedures (SOP) yang berlaku. Hal ini sesuai dengan prinsip *rule of law* dalam *good governance* menurut UNDP sebagaimana dikutip oleh Suuib (2016: 157), yang menjelaskan bahwa "kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu" SOP yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Terdapat 5 (lima) *standard operating procedures* (SOP) yang dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu SOP yang digunakan dalam proses pelayanan informasi dengan masyarakat, antara lain SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pengajuan permohonan informasi publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik yang digunakan

dalam proses pengajuan keberatan dan Pemohon Informasi, dan SOP Fasilitas Sengketa Informasi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik untuk hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik. Klasifikasi yang kedua yaitu SOP yang hanya digunakan di dalam internal instansi, antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang digunakan untuk menyusun daftar informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah pengurusan Badan Publik yang bersangkutan, dan SOP Uji Konsekuerensi yang digunakan dalam proses menguji konsekuensi yang mungkin timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada faktor struktur birokrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah berhasil mengimplementasikan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya mewujudkan *good governance*. Hal ini terbukti dengan adanya 5 (lima) *standaris operating procedures* (SOP) Keterbukaan Informasi Publik yang memiliki fungsi masing-masing, serta kelima *standaris operating procedures* (SOP) tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan mudah untuk dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan uraian keempat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Publik yang membidangi komunikasi dan informatika di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, telah berhasil mengimplementasikan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dan telah memenuhi 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward.

Keberhasilan implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, menandakan bahwa keterbukaan atau transparansi di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur telah baik. Transparansi menjadi syarat peningbagi terwujudnya *good governance*. Menurut UNDP sebagaimana dikutip oleh Syaib (2016:157), mengungkapkan bahwa "transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi". Sehingga dapat dimaknai bahwa, dengan adanya transparansi maka seluruh proses kebijakan, dan informasi publik dapat dengan mudah diketahui dan dimonitor oleh masyarakat.

Selain itu, dengan adanya transparansi atau keterbukaan di suatu pemerintahan, maka dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Sehingga hal ini pun dapat memenuhi prinsip *good governance*, yaitu pada prinsip *participation*. Menurut UNDP sebagaimana dikutip oleh Syaib (2016:157), prinsip *participation* mengisyaratkan bahwa "setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan/kebijakan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi instansi legitimasi yang mewakili kepentingannya".

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah berhasil mewujudkan *good governance* di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan tersebut terlihat dari adanya kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi publik di lingkup Jawa Timur, serta dalam pelaksanaan *governance* melibatkan pihak masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Koolman yang dikutip oleh Mulyadi (2015: E29-E30), yang mengartikan bahwa "governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut".

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah berhasil mewujudkan *good governance* di Pemerintahan

Provinsi Jawa Timur. Selain itu, di dapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mewujudkan *good governance*.

Pertama, faktor komunikasi. Faktor komunikasi belum sepenuhnya mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mewujudkan *good governance*. Hal ini karena masih terdapat kekurangan yaitu masih ada beberapa Informasi Publik di web PPID Provinsi Jawa Timur yang belum diperbarui, khususnya terkait dengan informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala.

Kedua, faktor sumber daya. Faktor sumber daya secara keseluruhan telah mampu mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mewujudkan *good governance*. Hal ini karena Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah memiliki sumber daya yang memadai, antara lain sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya sarana prasarana yang digunakan untuk mengimplementasikan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Timur.

Ketiga, faktor disposisi. Faktor disposisi telah mampu mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mewujudkan *good governance*. Hal ini terbukti dari sikap Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang baik, jujur, ramah, dan terbuka dalam melaksanakan Pelayanan Permohonan Informasi, serta memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan menaati peraturan yang berkaitan dengan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi.

Keempat, faktor struktur birokrasi. Faktor struktur birokrasi telah mampu mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mewujudkan *good governance*. Hal ini karena Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik telah sesuai dengan 5 *standard operating procedures* (SOP) Keterbukaan Informasi Publik, serta SOP tersebut mudah untuk diikuti oleh masyarakat.

11. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kominfo.jatimprov.go.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	2%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
5	Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung Student Paper	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	jamespapilayakepri.blogspot.com Internet Source	1%

Submitted to Binus University International

8	Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1%
10	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
11	Ertien Rining Nawangsari, Abid Amirudin. "The Implementation of Tourism Object Development Policy of Pasir Putih Panceng, Gresik District", Prosiding Semnasfi, 2018 Publication	<1%
12	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%
13	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1%
14	paj.upnjatim.ac.id Internet Source	<1%
15	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1%
16	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1%
17	suarausu.co Internet Source	<1%
18	eprints.undip.ac.id	

<1%

19

D F Sjoraida, A Asmawi, R K Anwar. "The spirit of democracy in the implementation of public information policy at the provincial government of West Java", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018

Publication

<1%

20

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1%

21

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1%

22

awangfaroeekishak.info

Internet Source

<1%

23

Submitted to University of Leicester

Student Paper

<1%

24

dadangdkshmh.blogspot.com

Internet Source

<1%

25

bpkad.jatimprov.go.id

Internet Source

<1%

26

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya

Student Paper

<1%

27

setneg.go.id

Internet Source

<1%

28	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%
29	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
30	www.pustakaskripsi.com Internet Source	<1%
31	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
32	disdukcapil.limapuluhkotakab.go.id Internet Source	<1%
33	charlesbronsons.blogspot.com Internet Source	<1%
34	www.portalkaltara.com Internet Source	<1%
35	www.pn-bantaeng.go.id Internet Source	<1%
36	www.impiannews.com Internet Source	<1%
37	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
38	lobikampus.blogspot.com Internet Source	<1%
39	eprints.ums.ac.id	

Internet Source

<1%

40

cokroaminotomenulis.blogspot.com

Internet Source

<1%

41

docplayer.net

Internet Source

<1%

42

www.infodiknas.com

Internet Source

<1%

43

mpira.ub.uni-muenchen.de

Internet Source

<1%

44

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1%

45

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1%

46

repository.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1%

47

erepository.uwks.ac.id

Internet Source

<1%

48

repository.unhas.ac.id

Internet Source

<1%

49

Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada

Student Paper

<1%

anzdoc.com

50

Internet Source

<1%

51

Agus Triyono, Ahmad Sihabudin, Dewi Widowati. "The Meaning of Public Information Openness Communication in Village Government of Central Java", Asian Research Journal of Arts & Social Sciences, 2019

Publication

<1%

52

Submitted to Sogang University

Student Paper

<1%

53

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

<1%

54

Submitted to Politeknik Negeri Bandung

Student Paper

<1%

55

Ahmad Khoirul Syani, Sohibul Mufid, Mufarrihul Hazin. "Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih", KHAZANAH PENDIDIKAN, 2018

Publication

<1%

56

Masrohatun Masrohatun. "Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Sister Province di Provinsi Jawa Tengah", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2018

Publication

<1%

Submitted to Universitas Islam Malang

57

Student Paper

<1%

58

Submitted to Universitas Ibn Khaldun

Student Paper

<1%

59

Submitted to Jayabaya University

Student Paper

<1%

60

Widuri Wulandari, Suranto Suranto, Eko Priyo Purnomo. "Collaborative Government Dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik", Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2019

Publication

<1%

61

Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Student Paper

<1%

62

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Student Paper

<1%

63

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On